

Mata uang kertas wajib telah mengambil fungsi emas dan perak, sehingga ia menjadi satu-satunya satuan hitungan dan media atau alat dalam tukar menukar. Segala sesuatu yang ada pada masa kini dinilai dengan mata uang kertas, dengan sebab tidak boleh lagi mentransaksikan emas atau perak, serta pasar telah menerima untuk menetapkannya sebagai harta bernilai, yang dapat disimpan dan dipergunakan sebagai pembayaran, sehingga mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Dengan demikian, hukum mata uang kertas sama persis dengan hukum emas dan perak yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh sebab itu diwajibkan mengeluarkan zakatnya, ia juga termasuk harta riba, sebagaimana hukum tersebut berlaku pada emas dan perak.

Hal ini sesuai dengan pendapat ulama madzhab Maliki dan Syafi'i yang menganggap alat emas dan perak adalah tsamaniyah (keberadaannya sebagai mata uang) dan pendapat Yusuf Qardhawi bahwa uang menempati posisi emas dilihat dari segi naqdiyah (alat bayar tunai). Uang menjadi sama kuat dengan emas dan perak. Orang yang mengambil keuntungan dari uang atau memberi keuntungan dengan uang tersebut termasuk riba, yang sudah pasti haramnya dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, transaksi jual beli uang kertas yang ada di LKS Al-Yasini termasuk transaksi barang ribawi karena uang merupakan barang ribawi menempati posisi emas dan perak dari segi alat tukar. Oleh karena itu LKS Al-Yasini harus tunduk terhadap peraturan tentang pertukaran mata uang kertas agar terhindar dari riba dalam melakukan transaksinya.

Dalam hal ini transaksi jual beli antar mata uang kertas Rupiah yang ada di LKS Al-Yasini tidak sesuai dengan syarat yang telah dijelaskan, karena LKS Al-Yasini melakukan jual beli uang kepada nasabah secara tempo atau berjangka artinya ketika LKS menyerahkan uang kepada anggota, anggota membayar uang tersebut secara cicil atau tempo, tidak dibayar seketika itu juga. Contoh, LKS menjual uang Rp 5.000.000 kepada anggota yang melakukan pembiayaan, kemudian anggota membayar uang tersebut sebesar Rp 6.680.000 (dengan tambahan margin keuntungan) dengan angsuran 12 kali yang dibayar tiap bulan. Sehingga jual beli ini hukumnya menjadi tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat tukar menukar mata uang dan dapat menimbulkan riba nasiah karena transaksi dilakukan tidak taqabudh (kontan/tunai).

Adapun syarat selanjutnya adalah tidak dibolehkan *al-tafāḍul* (tidak sama rata) apabila penukaran dengan satu jenis. Namun, jika dengan jenis yang berbeda maka dibolehkan *al-tafadhul*. Dalam hal ini, LKS Al-Yasini menjual antar mata uang sejenis yakni rupiah dengan rupiah yang tidak sama rata atau ada kelebihan, dengan menghitung margin keuntungan dari uang yang dijual. Kemudian anggota harus mengembalikan uang tersebut ditambah dengan margin keuntungan yang dihitung dari total uang. Contoh Rp 1.000.000 dijual oleh LKS Al-Yasini sebesar Rp 1.336.000 dengan angsuran 12 kali yang dibayar setiap bulan. Kelebihan nominal dalam jual beli uang kertas ini dapat menimbulkan riba *faḍl* karena tidak sama rata dalam pertukaran satu jenis barang ribawi yaitu uang rupiah tersebut.

Syarat *sharf* berikutnya yaitu pembayaran harus dengan kontan. Apabila pada kontrak transaksi terdapat penundaan dalam pembayaran, maka *al-sharf* hukumnya tidak sah, baik penundaan tersebut dari sebelah pihak, maupun dari kedua belah pihak. Sebab, serah terima harus dilakukan sebelum *al-iftirāq*. Sedangkan penundaan bertolak belakang dengan serah terima. Transaksi jual beli mata uang kertas rupiah yang ada di LKS Al-yasini juga bertentangan dengan syarat ini, karena pada praktiknya di LKS Al-Yasini, Jual beli uang kertas ini dilakukan dengan pembayaran berjangka. Sehingga praktik jual beli uang yang ada di LKS Al-Yasini hukumnya tidak sah sesuai dengan syarat yang telah dijelaskan.

Selanjutnya LKS Al-Yasini mengikuti pendapat ulama yang menganggap uang seperti *fulūs al-madrūbah* atau pecahan logam dan juga mengikuti ulama yang memperbolehkan jual beli uang kertas dengan uang kertas, dengan catatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi memiliki tujuan transaksi pada dzat (bendanya/kertas uang tersebut) sebagai komoditas, bukan nilai yang tersimpan didalamnya. Jadi boleh menjual Rp 100.000 kontan dibeli dengan 110.000 secara tempo.

Praktik jual beli uang sebagaimana yang terjadi di LKS Al-Yasini ini akan memenjarakan fungsi uang, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Al-Ghazali bahwa jika semakin banyak uang yang diperdagangkan, makin sedikit yang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Bila semua uang yang ada dipergunakan untuk membeli uang, tidak ada lagi uang yang dapat berfungsi sebagai alat tukar.

Selain itu, tidak seharusnya uang diperjual belikan seperti yang terjadi di LKS Al-Yasini, karena menurut Imam Al-Ghazali, Ibnu Rusyd dan Ibnu Taimiyah bahwa uang dibutuhkan sebagai nilai suatu barang dan berfungsi sebagai alat tukar. Uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Yang dimaksudkan dari uang bukanlah materialnya (komoditas), tetapi ia adalah sarana untuk bertransaksi menggunakannya

Oleh sebab itu, uang berbeda dengan harta lainnya. Sebab yang dimaksudkan dari harta, selain dinar dan dirham adalah pemanfaatannya. Sedangkan sesuatu yang menjadi perantara semata tidak menjadi tujuan pada materi ataupun bentuknya. Dengan demikian mata uang kertas pada maksud dan tujuannya berfungsi sebagai peran uang emas dan perak sebagai nilai harga tidak seperti peran komoditi biasa. Yang dituju dari komoditi adalah kegunaannya atau manfaat. Sedangkan yang dituju dari mata uang adalah transaksi. Sehingga, maka mata uang kertas bukan termasuk kelompok komoditi atau harta benda perniagaan

Dalam hal LKS Al-Yasini berpendapat bahwa mata uang kertas tersebut di samakan dengan fulus maka menurut Ahmad Hasan tidak dibenarkan mengqiyas sebuah permasalahan kepada permasalahan yang dihasilkan dari mengqiyas kepada masalah yang lain. Akan tetapi, permasalahan baru tersebut harus diqiyas langsung kepada sumber permasalahannya. Oleh sebab itu tidak dibenarkan mengqiyas mata uang kertas kepada fulus, tetapi harus mengqiyasnya langsung kepada dinar emas atau dirham perak. Karena fulus bukanlah uang pokok, fulus hanya uang

bantu, ia hanya digunakan untuk pembelian barang-barang murah yang tidak dapat dinilai dengan satu dirham, berbeda dengan uang kertas pada masa sekarang yang telah menjadi uang pokok atau uang wajib bahkan tidak ada uang pokok selain mata uang kertas.

Pendapat Dewan Syariah LKS Al-Yasini bahwa yang disepakati pada kontrak adalah kertas itu sendiri. Pendapat ini kurang tepat, karena pada dasarnya yang dimaksudkan dalam kontrak bukanlah material mata uang kertas tersebut. Akan tetapi kekuatan nilai belinya. Adapun materialnya, ia tidak memiliki harga sama sekali, bahkan tidak dianggap sebagai harta. Memang pada dasarnya kertas memang harta, tetapi materi lembaran kertas ini bukanlah termasuk harta. Namun ia dianggap sebagai harta sebab backing dan penguatan yang diberikan oleh otoritas keuangan. Oleh sebab itu, mata uang kertas menurut materialnya sama dengan sebutir gandum yang disebut oleh ulama dengan sebutan *tafiḥ* (tidak bernilai). Buktinya adalah, apabila otoritas keuangan telah menghapuskan nilai angkanya, maka pasar pun akan mencampakkan uang kertas tersebut, sebagaimana halnya benda yang tidak berharga lainnya.

Apabila negara atau pemerintah yang mengeluarkan mata uang kertas runtuh, maka uang kertas tersebut kehilangan nilai sama sekali. Ini sebenarnya bukti bahwa mata uang kertas bukanlah komoditi. Sebab yang dimaksud komoditi adalah manfaat dan materinya. Sedangkan mata uang kertas tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana komoditi lainnya, sebab tidak ada yang diinginkan dari lembaran kertas tersebut. Akan tetapi ia hanya

sekedar sarana untuk mendapatkan dan layanan lainnya. Dengan kata lain mata uang kertas adalah nilai harga terhadap komoditi dan layanan. Sebab seandainya ia adalah komoditi sebagaimana komoditi lainnya, niscaya nilainya tetap ada sekalipun pemerintah menghapuskan nilainya. Sebab, pemerintah tidak bisa menghapus manfaat yang ada pada komoditi.

Selain itu menganggap uang sebagai komoditas berarti sama saja seperti perekonomian kapitalis. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*), tetapi juga sebagai komoditas, uang juga dapat diperjual belikan dengan kelebihan, baik on the spot maupun secara tangguh (*forward*). Sedangkan dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, fungsinya hanya sebagai *medium of exchange*, bukan komoditas yang diperjual belikan dengan kelebihan, baik secara *on the spot* maupun bukan.

Praktik pembiayaan *murābahah* di LKS Al-Yasini menggunakan uang sebagai objeknya. Mereka biasa menyebutnya dengan istilah *bay' al-awraq* yakni jual beli uang kertas dengan uang kertas dengan berpedoman kepada *hujjah* Dewan Syariah LKS Al-Yasini. Mereka berpendapat bahwa praktik ini dipilih karena lebih minim resiko dan lebih mudah dijalankan. Dalam pembiayaan *murābahah* tidak bisa hanya menilai mudah dan minim resiko, akan tetapi harus memenuhi syarat sah dan rukunnya. Sehingga produk yang ditawarkan bisa sah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan uang sebagai objek *murābahah* memberi kesan tidak terjadi transaksi riil melainkan terjadi pinjam meminjam uang. Praktik

semacam ini tidak sah karena pada dasarnya, pembiayaan *murābahah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga, pembiayaan *murābahah* merupakan jual beli komoditas dengan harga tangguh. Sedangkan uang itu sendiri adalah alat tukar bukan komoditas. Selain itu, penggunaan uang dalam pembiayaan *murābahah* bisa menimbulkan riba, karena uang merupakan barang *ribawi*. Penggunaan barang ribawi sebagai objek *murābahah* harus berbeda jenis atau sama jenisnya tetapi nilainya sama agar terhindar dari *ribā*.

